



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1904, 2016 KEMENDAGRI. Rencana Kerja. Tahun 2016.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 98 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 yang merupakan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 mengalami perubahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016, terdapat *self blocking* atas anggaran Kementerian Dalam Negeri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun

Anggaran 2016;

- c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016, perlu dilakukan penyesuaian atas program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
 3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016.

Pasal I

Mengubah Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2034), terkait dengan penyesuaian atas program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016											
PENYESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016											
I. SEKRETARIAT JENDERAL											
KODE	PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK			PAGU (Rp. X 1.000)						KET
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010.01.01	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDAGRI	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas lintas unit kerja di bidang perencanaan, keuangan dan pengelolaan BMN, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan tata kelola, pelayanan data, informasi dan komunikasi publik, penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pengadaan barang/jasa dan pelayanan administrasi lainnya	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas lintas unit kerja di bidang perencanaan, keuangan dan pengelolaan BMN, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan tata kelola, pelayanan data, informasi dan komunikasi publik, penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pengadaan barang/jasa dan pelayanan administrasi lainnya	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
1	Persentase Capaian Program Prioritas dan Kualitas Capaian Kinerja Kemendagri	a. 100% tercapai program prioritas b. LAPKIN Kategori A	a. 100% tercapai program prioritas b. LAPKIN Kategori A	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
2	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Pengelolaan BMN	WTP	WTP	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
3	Tingkat Kepuasan Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik Kemendagri	a. 100% kepuasan terhadap pengelolaan SDM b. 100% kepuasan terhadap pelayanan komunikasi publik 70% (Kategori B)	a. 100% kepuasan terhadap pengelolaan SDM b. 100% kepuasan terhadap pelayanan komunikasi publik 70% (Kategori B)	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
4	Peningkatan Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi	45%	45%	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
5	Penyediaan data dan informasi Kemendagri yang terintegrasi	60% penyelesaian produk hukum dan sengketa hukum	60% penyelesaian produk hukum dan sengketa hukum	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
6	Persentase Penyelesaian Produk Hukum dan Sengketa Hukum Kemendagri	100% penyelesaian sengketa hukum	100% penyelesaian sengketa hukum	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	

1214	PENATAAN PRODUK HUKUM DAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM	Meningkatnya keselesaan dan harmonisasi peraturan Perundang-undangan melalui kajian hukum dan kebijakan daerah, serta penyiapan produk hukum, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum, dan dokumentasi hukum lingkup Kemendagri	Meningkatnya keselesaan dan harmonisasi peraturan Perundang-undangan melalui kajian hukum dan kebijakan daerah, serta penyiapan produk hukum, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum, dan dokumentasi hukum lingkup Kemendagri	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	-	7,000,000	7,000,000
	1. Persentase Telaahan Kebijakan yang terfasilitasi	100%	100%	-	1,735,165	1,735,165	1,735,165	-	1,706,129	1,706,129
	2. Jumlah Peraturan Perundang-undangan Kemendagri yang masuk Prolegdagri	60 Rancangan Per-UU	60 Rancangan Per-UU	-	1,664,017	1,664,017	1,664,017	-	1,467,317	1,467,317
	3. Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum di Lembaga Peradilan dan Bantuan Hukum	100%	100%	-	2,050,604	2,050,604	2,050,604	-	1,902,951	1,902,951
	4. Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Biro	100%	100%	-	2,550,214	2,550,214	2,550,214	-	1,923,603	1,923,603
1215	PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya kualitas pengelolaan Pegawai di lingkungan Kemendagri	Meningkatnya kualitas pengelolaan Pegawai di lingkungan Kemendagri	200,000	19,800,000	20,000,000	20,000,000	200,000	14,300,000	14,500,000
	1. Perencanaan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	100%	-	841,850	841,850	841,850	-	623,975	623,975
	2. Tingkat Kepuasa Pegawai atas Pengelolaan SDM Kemendagri	100%	100%	200,000	9,203,220	9,403,220	9,403,220	200,000	7,388,213	7,588,213
	3. Jumlah PNS yang mengikuti penilaian kompetensi pegawai	3.700 Orang	3.700 Orang	-	8,570,555	8,570,555	8,570,555	-	5,451,123	5,451,123
	4. Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Biro Kepegawaian	100%	100%	-	1,184,375	1,184,375	1,184,375	-	836,689	836,689
1216	PENATAAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN REFORMASI BIROKRASI	Meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan unit layanan administrasi serta penerapan hasil analisis jabatan dan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemendagri	Meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan unit layanan administrasi serta penerapan hasil analisis jabatan dan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemendagri	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	5,000,000	5,000,000
	1. Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kemendagri	2 Perme ndagri	2 Perme ndagri	-	1,790,164	1,790,164	1,790,164	-	1,483,603	1,483,603
		150 SOP	150 SOP							
	2. Persentase Penerapan Hasil Analisa Jabatan Kemendagri	85% Pelaksanaan Hasil Anjab	85% Pelaksanaan Hasil Anjab	-	728,134	728,134	728,134	-	513,885	513,885

	3	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	70%			-	1,294,640	1,294,640	-	933,590	933,590
	4	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Biro Organisasi dan Tata Laksana	100%			-	2,187,062	2,187,062	-	2,068,922	2,068,922
1217		PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	Meningkatnya kualitas dan terimplementasikannya secara optimal perencanaan program dan anggaran, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja program dan anggaran lingkup Kemendagri	100%		-	13,000,000	13,000,000	-	9,380,000	9,380,000
	1	Persentase Konsistensi Rencana Program dan Anggaran Kemendagri	100%			-	7,850,000	7,850,000	-	5,729,303	5,729,303
	2	Persentase Capaian Program Prioritas dan Kualitas Capaian Kinerja Kemendagri	100%	LAPKIN kategori A		-	4,300,000	4,300,000	-	2,800,697	2,800,697
	3	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Biro Perencanaan	100%			-	850,000	850,000	-	850,000	850,000
1218		PENGLOLAAN KETATAUSAHAAN, RUMAH TANGGA, SERTA SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN	Meningkatnya Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Layanan Pengadaan, Keamanan, serta Sarana dan Prasarana Perkantoran sesuai kebutuhan	86%		-	9,112,213	9,112,213	-	7,850,533	7,850,533
	1	Persentase Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Keamanan sesuai Kebutuhan	100%			65,290,185	33,035,068	98,325,253	58,790,185	25,035,068	83,825,253
	2	Persentase Dukungan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Kemendagri	100%			-	3,000,000	3,000,000	-	2,542,050	2,542,050
	3	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan	100%			-	20,922,855	20,922,855	-	14,642,485	14,642,485
	4	Persentase Penyelesaian Pelayanan Operasional Kerja (operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) lingkup Setjen yang tepat waktu	100%			65,290,185	-	65,290,185	58,790,185	-	58,790,185

1219	PENATAAN FASILITASI KERJASAMA	Meningkatnya penataan fasilitasi kerjasama Kemendagri dan Pemerintah Daerah dengan mitra dalam dan luar negeri	Meningkatnya penataan fasilitasi kerjasama Kemendagri dan Pemerintah Daerah dengan mitra dalam dan luar negeri	-	6,500,000	6,500,000	-	4,800,000	4,800,000
	1	Persentase Fasilitasi Penataan Kerjasama Kemendagri dan Pemerintah Daerah dengan Dalam dan Luar Negeri	100%	-	4,350,000	4,350,000	-	3,022,072	3,022,072
	2	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Pusat Fasilitasi Kerja Sama	100%	-	2,150,000	2,150,000	-	1,777,928	1,777,928
1220	PENGLOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara Kemendagri	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara Kemendagri	#####	12,000,000	#####	#####	10,000,000	#####
	1	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	-	5,086,795	5,086,795	-	4,257,375	4,257,375
	2	Persentase Surat Permintaan Penyelesaian terkait Pengelolaan BMN di Lingkungan Kemendagri yang dapat di proses	100%	-	943,450	943,450	-	649,590	649,590
	3	Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan lingkup Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan tepat waktu	100%	-	2,857,377	2,857,377	-	2,442,762	2,442,762
	4	Persentase Penyelesaian Kerugian Negara dan Perbendaharaan Lingkup Kemendagri	100%	-	2,068,568	2,068,568	-	1,679,493	1,679,493
	5	Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai) yang tepat waktu	100%	#####	-	#####	#####	-	#####
	6	Persentase Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Biro Keuangan dan Aset	100%	-	1,043,810	1,043,810	-	970,780	970,780

1221	PENGLOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi serta pelayanan komunikasi dan telekomunikasi lingkup Kemendagri	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi serta pelayanan komunikasi dan telekomunikasi lingkup Kemendagri	7,680,000	26,037,324	33,717,324	7,331,000	17,806,324	25,137,324
	1 Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi Kemendagri	11 Dokumen Kebijakan	10 Dokumen Kebijakan	-	2,403,095	2,403,095	-	1,535,679	1,535,679
	2 Pemanfaatan Data dan Informasi Pokok Kemendagri	40 data informasi/pokok	30 data informasi/pokok	-	2,663,540	2,663,540	-	1,365,654	1,365,654
	3 Pengelolaan Sistem Informasi Lingkup Kemendagri	10 aplikasi	9 aplikasi	-	2,334,230	2,334,230	-	1,861,876	1,861,876
	4 Operasionalisasi Infrastruktur TIK lingkup Kemendagri	85% Infrastruktur TIK	75% Infrastruktur TIK	7,680,000	6,362,075	14,042,075	7,331,000	1,199,155	8,530,155
	5 Pelaksanaan Rakor regulars via teleconference Pusat dan Daerah	100%	100%	-	12,274,384	12,274,384	-	11,843,960	11,843,960
1222	PENGLOLAAN ADMINISTRASI PIMPINAN	Meningkatnya pengelolaan administrasi pimpinan dalam rangka penyediaan materi dan kebijakan, tata usaha serta keprotokolalan	Meningkatnya pengelolaan administrasi pimpinan dalam rangka penyediaan materi dan kebijakan, tata usaha serta keprotokolalan	3,000,000	11,300,000	14,300,000	3,000,000	9,800,000	12,800,000
	1 Tingkat Ketepatan Waktu Operasional Ketatausahaan Pimpinan	100%	100%	3,000,000	2,130,325	5,130,325	3,000,000	2,105,225	5,105,225
	2 Persentase Terlaksananya Koordinasi Pimpinan dan Penyelenggaraan Keprotokolalan	100%	100%	-	8,315,710	8,315,710	-	6,858,810	6,858,810
	3 Persentase Penyediaan Materi Rapat, Materi Persidangan dan Materi Kebijakan Kemendagri	100%	100%	-	853,965	853,965	-	835,965	835,965
1223	PENGLOLAAN KEHUMASAN	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan penyerbaluasan informasi kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat serta pelayanan perpustakaan dan pendokumentasian	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan penyerbaluasan informasi kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat serta pelayanan perpustakaan dan pendokumentasian	100,000	10,100,000	10,200,000	100,000	8,100,000	8,200,000
	1 Persentase Fasilitasi dan Pelayanan Hubungan Masyarakat	100%	100%	-	5,205,703	5,205,703	-	4,164,562	4,164,562

2	Persentase Fasilitas Pengaduan dan Pengelolaan Informasi	100%	100%	-	2,217,920	2,217,920	2,217,920	-	1,774,366	1,774,366
3	Persentase Pelayanan Perpustakaan Kemendagri	100%	100%	100,000	1,272,130	1,372,130	1,372,130	100,000	997,694	1,097,694
4	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Pusat Penerangan	100%	100%	-	1,404,247	1,404,247	1,404,247	-	1,163,378	1,163,378